

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana oleh suatu negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik (Anshari, 2019). Menurut Hasan (2018) tujuan pembangunan ekonomi terbagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tujuan jangka panjang pembangunan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dan berlandaskan pada Pancasila, sehingga tercipta kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tersebut. Menurut Harahap (2019) pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran, taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan wilayah.

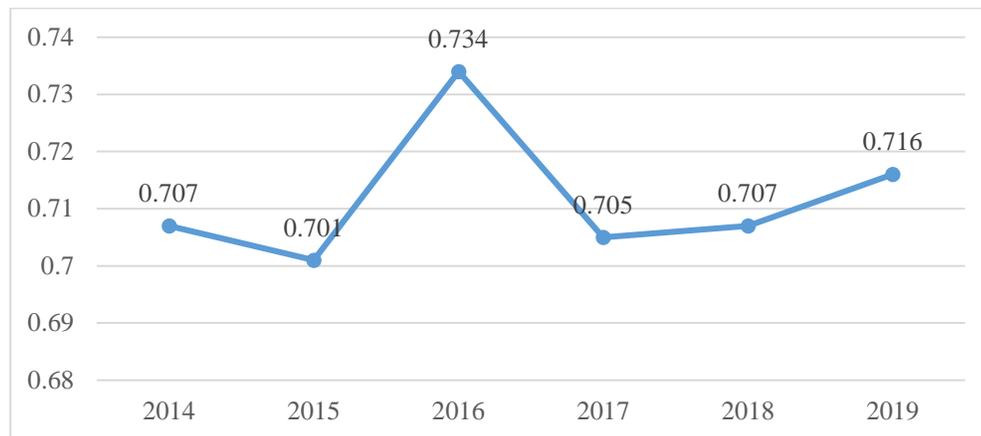
Menurut teori Williamson, ketimpangan wilayah merupakan perbedaan pembangunan antar wilayah yang disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan awal pelaksanaan pembangunan antar wilayah (Arham, 2014). Ketimpangan wilayah masih menjadi masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Menurut Maryati *et al* (2019) terjadinya ketimpangan wilayah merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh setiap negara mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan bahkan global. Terjadinya ketimpangan wilayah dapat disebabkan oleh adanya perbedaan aktivitas ekonomi, pendapatan, dan indikator sosial (Santi, 2021). Meningkatnya ketimpangan wilayah dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Ravinthirakumaran, 2018). Oleh sebab itu, pengurangan

ketimpangan wilayah perlu dilakukan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Permasalahan terjadinya ketimpangan wilayah penting untuk diteliti mengingat bahwa ketimpangan wilayah merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Nilai indeks williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut (Yuliani, 2015). Hasil pengukuran dari indeks ketimpangan wilayah ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1, jika Indeks ketimpangan semakin mendekati angka 0 maka ketimpangan antar wilayah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi merata dan sebaliknya jika indeks ketimpangan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan semakin tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

Ketimpangan wilayah di Indonesia masih menjadi isu penting dimana hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi wilayah di Indonesia yang cukup luas dengan karakteristik masing-masing wilayah yang berbeda (Santi, 2021). Terjadinya ketimpangan wilayah di Indonesia tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis ataupun politik yang dimiliki setiap wilayah. Keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah memang dapat menjadi sebuah keunggulan masing-masing wilayah, namun disisi lain adanya keragaman tersebut juga dapat berpotensi terhadap ketidakstabilan sosial dan politik. Selain itu, perbedaan tingkat pendapatan, modal manusia, ketersediaan layanan dasar dan infrastruktur juga merupakan beberapa penyebab terjadinya ketimpangan wilayah di Indonesia. Menurut Kadriwansyah *et al* (2021) pembangunan di Indonesia bagian timur lebih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di Indonesia bagian barat. Hal tersebut merupakan penyebab ketimpangan wilayah di Indonesia terus terjadi sebagaimana terlihat dari kuatnya kawasan barat Indonesia sebagai pusat gravitasi pembangunan dan mengakibatkan kawasan timur Indonesia sebagai kawasan yang tertinggal..

Ketimpangan wilayah di Indonesia sangat penting untuk diteliti karena kegiatan perekonomian nasional cenderung terkonsentrasi ke kawasan barat Indonesia, sehingga hal itu mengakibatkan angka ketimpangan wilayah di Indonesia semakin tinggi. Gambar 1 menunjukkan tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014-2019.



Sumber : BPS diolah

Gambar 1. Tingkat Ketimpangan Wilayah Indonesia Tahun 2014-2019

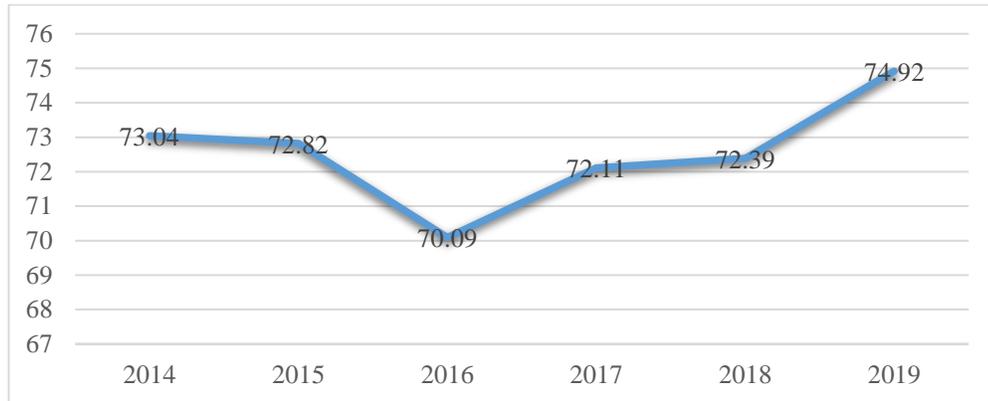
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa ketimpangan wilayah di Indonesia dari tahun 2014-2019 cenderung fluktuatif. Hal tersebut merupakan suatu masalah karena tingkat ketimpangan wilayah menunjukkan hasil yang tinggi dan mendekati angka 1. Tingginya tingkat ketimpangan wilayah tersebut terjadi karena pembangunan yang tidak merata. Badan Pusat Statistik (2020) melaporkan bahwa pembangunan di Indonesia hanya berfokus pada beberapa titik saja khususnya di Pulau Jawa dan kawasan bagian barat lainnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya gap antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan membuat angka ketimpangan menjadi tinggi.

Setelah ditetapkan menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo secara aktif berupaya menurunkan ketimpangan wilayah (Anggelo, 2021). Menurut Rawinarno (2019) pada masa pemerintahan, Joko Widodo mencetuskan Nawa Cita sebagai sembilan program kerja utama dan menjadi landasan

paradigma pembangunan di Indonesia. Salah satu poin dari program tersebut yaitu memperluas pemerataan pembangunan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia. Prioritas dari pembangunan tidak hanya fokus terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga menegaskan adanya kehadiran negara dan pemerintah di masyarakat, memperluas pemerataan pembangunan di setiap wilayah, mengurangi pengabaian terhadap pelayanan publik, membangun kemandirian ekonomi dan menjaga nilai-nilai budaya melalui revolusi mental serta meneruskan restorasi bangsa.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan wilayah adalah kurangnya perbaikan indeks demokrasi di Indonesia (Anggelo, 2021). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dinilai mampu menjamin persamaan hak warga negara, kebebasan individual, dan tegaknya keadilan hukum (Wirawiryawan *et al* 2021). Menurut Wirawiryawan *et al* (2021) adanya sistem demokrasi membuat hak suara setiap masyarakat sama. Adanya kesamaan hak tersebut membuat masyarakat kelas menengah dan bawah dapat menuntut redistribusi pendapatan yang lebih adil. Apabila pemerintah memberikan respon yang baik terhadap tuntutan tersebut, maka akan meningkatkan ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah, sehingga berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang merata dan mengurangi terjadinya ketimpangan wilayah.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019, terdapat permasalahan demokrasi yaitu kurangnya kebebasan mengeluarkan pendapat. Rawinarno (2019) mengatakan bahwa sepanjang tahun 2015 ada sebanyak 238 kasus pembatasan kebebasan untuk berpendapat. Kurangnya kebebasan mengeluarkan pendapat dapat menimbulkan adanya masalah dalam demokrasi Indonesia yaitu terjadinya kecenderungan penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Berikut merupakan gambar Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014-2019.



Sumber : BPS

Gambar 2. Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2014-2019

Berdasarkan gambar di atas, indeks demokrasi Indonesia pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2014-2016 menunjukkan tren menurun yang perlu mendapat perhatian khusus. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan kurangnya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat pada masa pemerintahan Joko Widodo. Adanya pembatasan tersebut mengakibatkan masyarakat sulit mengeluarkan aspirasinya untuk menuntut kebijakan pemerintah yang lebih baik. Meskipun pada tahun 2017-2019 mulai terjadi peningkatan, namun angka indeks demokrasi Indonesia belum sesuai dengan capaian target yang ditentukan yaitu sebesar 75 persen (Rawinarno, 2019).

Selain itu, Anggelo (2021) mengungkapkan bahwa sistem demokrasi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap tiga jenis modal yaitu: manusia, sosial dan politik. Peningkatan ketiga modal tersebut dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan sistem demokrasi yang baik dinilai berhasil meningkatkan modal manusia melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mampu meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Oleh karena itu indeks demokrasi Indonesia diasumsikan dapat mengurangi terjadinya ketimpangan wilayah jika diiringi dengan peran aktif pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan modal manusia di bidang

kesehatan dan pendidikan serta modal fisik yang meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Menurut Hazmi (2021) kebebasan sipil berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, hak-hak politik dan peningkatan investasi. Dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis maka akan mendorong para investor asing untuk berinvestasi. Menurut Alfaro (2003) penanaman modal asing berdampak terhadap meningkatnya sektor manufaktur. Semakin banyaknya sektor manufaktur di setiap daerah maka perekonomian Indonesia akan semakin meningkat, pengangguran semakin berkurang, produksi barang meningkat, sehingga ketimpangan wilayah akan menurun.

Menurut Phelps *et al* (2014) desentralisasi fiskal merupakan strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya ketimpangan di suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat mengetahui informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah, sehingga dapat membuat kebijakan daerah yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan desentralisasi fiskal yang diambil adalah melalui transfer dana perimbangan ke masing-masing daerah. Diterapkannya desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan yang tepat sasaran akan membuat daerah dapat mengelola daerahnya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga akan mengurangi ketimpangan wilayah (Santi, 2021). Hal tersebut didasarkan bahwa melalui desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga pengalokasian anggaran untuk pembangunan dapat lebih efisien. Selain itu, dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja untuk pembangunan daerah sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Hal tersebut akan meningkatkan pembangunan di setiap daerah dan berdampak terhadap menurunnya ketimpangan wilayah.

Namun, menurut Gratia (2021) desentralisasi fiskal juga dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan wilayah karena adanya pertumbuhan ekonomi yang

berbeda di setiap daerah. Hal itu dikarenakan desentralisasi fiskal menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, sementara potensi yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda, sehingga menyebabkan daerah yang kaya akan potensi alam lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah yang potensinya sedikit.

Pembangunan Infrastruktur merupakan aspek penting yang perlu dilakukan di setiap wilayah guna mempercepat proses pembangunan nasional dan regional. Menurut Sukirno (2013) infrastruktur merupakan komponen utama untuk meningkatkan dan mengembangkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan produktivitas daerah. Infrastruktur juga berperan sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur jalan merupakan urat nadi yang berperan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan (Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004). Pembangunan infrastruktur jalan yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian negara (Kusuma, 2019). Ketersediaan infrastruktur jalan dapat menjamin keterhubungan antar wilayah dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Selain itu, tingginya konektivitas jaringan jalan akan mempermudah akses masyarakat untuk menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan lainnya (Rahayu, 2020). Menurut Kharisma (2018) jalan merupakan prasarana yang dapat menghubungkan antara produsen, pasar dan konsumen. Oleh karena itu, tersedianya infrastruktur jalan yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan wilayah.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan juga memiliki peran yang sangat penting di suatu daerah mengingat bahwa fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kualitas manusia yang sehat (Suherman, 2018). Selanjutnya

dengan tersedianya infrastruktur kesehatan yang mencukupi, ketahanan kesehatan masyarakat akan terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat keterbatasan penanganan medis. Selain itu, tersedianya infrastruktur kesehatan yang memadai akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi masyarakat yang sehat akan dapat bekerja dengan baik, sehingga mampu mengurangi terjadinya pengangguran dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berpengaruh terhadap menurunnya ketimpangan wilayah.

Infrastruktur lain yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah infrastruktur pendidikan. Pendidikan merupakan penghubung bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat (Rahayu, 2005). Kurangnya pendidikan dapat menimbulkan dampak pada tingkat kemiskinan, kasus kriminal dan pengangguran sehingga dapat mengakibatkan ketimpangan wilayah yang cukup tinggi (Safira *et al.* 2019). Menurut Todaro (2000) pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas manusia sehingga tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai. Tercapainya pembangunan di setiap wilayah akan berdampak pula terhadap pemerataan pembangunan nasional, sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya ketimpangan wilayah.

Menurut Safira *et al* (2019) implikasi dari pembangunan pendidikan adalah kehidupan manusia semakin berkualitas. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenal pendidikan (Hindun *et al.* 2019). Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan memperoleh pendapatan yang tinggi dibanding dengan mereka yang

berpendidikan rendah. Hal itu dikarenakan peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh pekerjaan lebih mudah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika hal ini terjadi hampir diseluruh lapisan masyarakat, maka distribusi pendapatan akan semakin merata, sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya ketimpangan wilayah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa ketimpangan wilayah merupakan salah satu masalah pokok yang masih dihadapi negara-negara di dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya suatu ketimpangan wilayah antara lain perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, kurang lancar mobilitas barang dan jasa, kurang lancarnya perdagangan antar wilayah, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Keterbaruan penelitian ini yaitu menganalisis tentang pengaruh demokrasi pada tahun 2014-2019 terhadap ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mendalam tentang determinan yang dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan wilayah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat dari Gambar 1 bahwa ketimpangan wilayah di Indonesia dari tahun 2014-2019 cenderung fluktuatif dan angka ketimpangan wilayah di Indonesia masih tinggi . Hal itu terbukti dengan hasil angka indeks williamson di Indonesia pada tahun 2014-2019 yang hampir mendekati angka 1. Tingginya angka indeks Williamson tersebut dipengaruhi oleh menurunnya indeks demokrasi Indonesia tahun 2014-2019. Menurunnya indeks demokrasi Indonesia terjadi karena adanya pembatasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu yang mengemukakan adanya pengaruh demokrasi, desentralisasi fiskal, infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan terhadap ketimpangan wilayah.

Berdasarkan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya dan mengacu pada uraian masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2014-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2014-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2014-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2014-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2014-2019 ?

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu membahas tentang ketimpangan wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada determinan yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2014-2019. Variabel independen yang digunakan yaitu demokrasi, desentralisasi fiskal, infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan.

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada tahun 2014-2019.
- b. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada tahun 2014-2019.
- c. Menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada tahun 2014-2019.

- d. Menganalisis pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada tahun 2014-2019.
- e. Menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada tahun 2014-2019.

2. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini menganalisis terkait ketimpangan wilayah berdasarkan teori Williamson yaitu dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson yang diukur melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masing-masing wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan pengetahuan ekonomi regional berkaitan dengan ketimpangan wilayah serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah pusat diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan kebijakan demokrasi di Indonesia.
- b. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait penerapan strategi kebijakan desentralisasi fiskal melalui transfer dana perimbangan.
- c. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan.